

ISBN: 978-602-14594-0-9

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL EKOWISATA

**Peran Kepemimpinan dan Inovasi Penduduk Lokal
dalam Pengembangan Ekowisata**

**Universitas Widyagama Malang
12 Nopember 2013**

Diselenggarakan oleh
**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2013**

ISBN: 978-602-14594-0-9

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKOWISATA

Peran Kepemimpinan dan Inovasi Penduduk Lokal
dalam Pengembangan Ekowisata

Universitas Widyagama Malang
12 Nopember 2013

Diselenggarakan oleh
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2013

SEMINAR NASIONAL EKOWISATA PERAN KEPEMIMPINAN DAN INOVASI PENDUDUK LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA

Penanggungjawab:
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang

Editor:
Iwan Nugroho
Soemarno
Luchman Hakim
Rita Hanafie
Wiwin Purnomowati
Evi Nurifah Julitasari
Sudiyono
Frida Dwi Anggraeni

Diselenggarakan oleh
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2013

Katalog Dalam Terbitan

Prosiding: SEMINAR NASIONAL EKOWISATA

Peran Kepemimpinan dan Inovasi Penduduk Lokal dalam Pengembangan Ekowisata

Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang

Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang

xiv - 296 hal.; 20x25 cm

ISBN 978-602-14594-0-9

1. Ekowisata
2. Peran Kepemimpinan dan Inovasi Penduduk Lokal dalam Pengembangan Ekowisata

Editor:

Prof. Dr. Ir. Iwan Nugroho, MS

Prof. Dr. Ir. Sumarno, MS

Dr. Luchman Hakim, MAgr.MSc

Dr. Ir. Rita Hanafie, MP

Dra. Wiwin Purnomowati, MSi

Dr. Evi Nurifah Julitasari, SP, MP

Ir. Sudiyono, MP

Frida Dwi Anggraeni, STP, MSc

Perancang Sampul:

Santoso, SP

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang

Jl. Borobudur 35 Malang 65128

Tlp. 0341-492282

Fax. 0341-496919

Website: <http://www.widyagama.ac.id>

Makalah-makalah dalam buku ini telah disampaikan
pada Seminar Nasional Ekowisata dengan tema Peran Kepemimpinan dan Inovasi
Penduduk Lokal dalam Pengembangan Ekowisata
di Universitas Widyagama Malang
12 Nopember 2013

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekowisata dengan tema Peran Kepemimpinan dan Inovasi Penduduk Lokal dalam Pengembangan Ekowisata ini, ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada:

1. Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
2. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
3. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
4. Bupati Malang
5. Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang
6. Rektor Universitas Widyagama Malang
7. Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
8. Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
9. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri
10. Pimpinan Bank Jatim Cabang Batu
11. Bapak H. Sambari Halim Radianto
12. Pimpinan Radar Malang
13. Pembina Masyarakat Ekowisata Rajegwesi Banyuwangi
14. Presiden Komisaris PT Tiga Mulia Abadi
15. Pimpinan Koperasi Desa Wisata Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang
16. Pimpinan De'Wiga Regency
17. Pimpinan PT. Agiya Kenyar

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan mendapat balasan berlimpah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semuanya.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vi
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN	viii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG	x
DAFTAR ISI	xii
1. PERAN KEPEMIMPINAN DAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN EKOWISATA BERBASIS PENDUDUK LOKAL. Iwan Nugroho dan Purnawan D Negara	1
2. INOVASI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA. Luchman Hakim	21
3. PERAN KEPEMIMPINAN DAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN PERKREDITAN BERBASIS KELEMBAGAAN KASUS SUBAK GUAMA TABANAN BALI. Anak Agung Ngurah Bagus Kamandalu dan I Gusti Komang Dana Arsana	39
4. PERAN KEPEMIMPINAN DAN INOVASI LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA: Studi Kasus Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Rukavina Baksh	40
5. KAJIAN PENGEMBANGAN EKOWISATA BAHARI TANJUNG ENU TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR. Yulianti Kalaba, Lien Damayanti, James Walalangi dan Erny Sirappa	51
6. PERANAN TEKNOLOGI UNTUK MEMAJUKAN KELEMBAGAAN SUBAK BERBASIS EKOWISATA DI TABANAN BALI. I Gusti Komang Dana Arsana dan I Wayan Alit Artha Wiguna	61
7. MEMASARKAN EKOWISATA BANYUWANGI YANG BERORIENTASI WISATA ALAM, PRODUK KHAS DAN ETNIS OSING BANYUWANGI, JAWA TIMUR. Ismini	76
8. PERANCANGAN MANGROVE REHABILITATION CENTER KRAKSAAN – PROBOLINGGO DENGAN KONSEP EKOWISATA. M Nelza Mulki Iqbal	94
9. FESTIVAL BUDAYA LEMBAH BALIEM SEBAGAI AJANG PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN WISATAWAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PAPUA. Erinus Mosip	112
10. BALI DAN PAPUA DI GARIS DEPAN GLOBAL: REFLEKSI EKOLOGI DAN PARIWISATA. I Ngurah Suryawan	120
11. FUNGSI IZIN DALAM PENGENDALIAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH. Fatkhurohman	130
12. PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUNJANG PARIWISATA. Hidayat Bambang S	142
13. PENGEMBANGAN WISATA SECARA BERKELANJUTAN BERBASIS KELEMBAGAAN DI GUGUS PULA SAPEKEN. Romadhon A	157

14. STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA DALAM KERANGKA KONSEP AGROPOLITAN MENUJU SUSTAINABLE DEVELOPMENT & ENVIRONMENT. Rikawanto Eko M	171
15. KARAKTERISTIK PENGUNJUNG WANAWISATA HUTAN KERA NEPA SAMPANG PASCA TERBUKANYA AKSE JEMBATAN SURAMADU. Ihsannudin	180
16. KONSEP SMART CITY MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA MALANG. Wiwin Purnomowati	190
17. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DAN IMPLIKASINYA PADA PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA (Studi Empirik pada Obyek Wisata di kota Batu). Wahyu Wulandari dan Dharmayanti Prihandini	202
18. MENGGAGAS PAKET EKOWISATA KOTA MALANG SEBAGAI SALAH SATU MEDIA PEMBELAJARAN BAGI MASYARAKAT. Kun Aniroh M Gunadi	217
19. PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN ANTI GEMUK SEBAGAI DAYA TARIK WISATAWAN. Sukamto	228
20. PENGELOLAAN DESA WISATA SEHAT DALAM RANGKA PELESTARIAN KERAGAMAN HAYATI GULMA BIOFARMAKA. Untung Sugiarti dan Rikawanto Eko M	240
21. PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN BERBAHAN BAKU PANGAN LOKAL SEBAGAI PENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH. Rita Hanafie	247
22. KONTRIBUSI PENDAPATAN BUDIDAYA TERPADU DI LAHAN KERING DATARAN RENDAH BERIKLIM KERING TIANYAR TIMUR KARANGASEM BALI. I Gusti Komang Dana Arsana	256
23. WISATA KULINER SEBAGAI PENUNJANG DESA EKOWISATA. Enny Sumaryati	268
24. PENGEMBANGAN DESA WISATA DI INDONESIA BERBASIS SISTEM PERTANIAN ORGANIK. Ririen Prihandarini	277
25. ANALISIS STRATEGIS POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI KAWASAN PESISIR RAJEGWESI BANYUWANGI DALAM PENGEMBANGAN MODEL EKOWISATA Hasan Zayadi dan Luchman Hakim	291
26. TENGGER DALAM PUSARAN INDUSTRIALISASI PARIWISATA: SEBUAH REFLEKSI KEBIJAKAN PARIWISATA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN EROSI KULTURAL DAN DAMPAK EKOLOGI Purnawan D. Negara	305
27. POLA PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK JASA PEMANDU WISATA GUNUNG BROMO Bambang Supriadi	327
28. PAKET WISATA ASEAN SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN ASEAN SEBAGAI TUJUAN WISATA TUNGGAL (SINGLE DESTINATION) Hapsari Setyowardhani	341

PERAN KEPEMIMPINAN DAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN EKOWISATA BERBASIS PENDUDUK LOKAL

Iwan Nugroho dan Purnawan D Negara

Program Studi Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Widyagama Malang

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

Email: iwanuwg@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Kepemimpinan dan inovasi memberikan pengaruh signifikan dalam pengembangan kewirausahaan jasa ekowisata berbasis penduduk lokal. Kepemimpinan dan inovasi dapat mengawal visi konservasi, dan meningkatkan partisipasi penduduk lokal, serta mengembangkannya untuk memberikan nilai tambah ekowisata. Hasil studi penulis menunjukkan bahwa kepemimpinan di desa Ngadas belum berfungsi optimal memotivasi pembentukan organisasi ekowisata. Kepemimpinan belum menjamin tercapainya visi konservasi dan kesejahteraan. Sementara itu, kepemimpinan di Rajegwesi mampu menjalankan visi dan misi konservasi lingkungan. Kepemimpinan dalam organisasi MER menghasilkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi ekowisata. Fenomena kepemimpinan ekowisata di desa Candirejo berfungsi optimal. Jasa ekowisata Candirejo dikelola oleh masyarakat secara mandiri dalam manajemen koperasi dan mampu menyajikan produk dan jasa ekowisata yang inovatif dan berkualitas, serta menarik jumlah pengunjung yang signifikan, khususnya wisatawan asing. Hal ini dapat memperkaya studi pengelolaan ekowisata. Selama ini, pengelolaan ekowisata senantiasa dihubungkan dengan standar pengelolaan oleh taman nasional. Ekowisata Candirejo termasuk yang dipandang berhasil sekalipun berada di luar pengelolaan taman nasional. Implementasi peran kepemimpinan dan inovasi dalam pengembangan kewirausahaan jasa ekowisata dinyatakan melalui strategi sebagai berikut: (i) produksi dan partisipasi, dengan penekanan kepada identifikasi produk dan jasa, produk unggulan, inovasi produk, manajemen produk, dan social entrepreneur; (ii) promosi dan kerjasama, menekankan kepada segmentasi pasar, kerjasama (networking), dan pengembangan media promosi; (iii) pendidikan konservasi, dengan fokus kepada interpretasi, komunikasi, dan kemasan program (budidaya, mengolah, memperingati); (iv) manajemen dan organisasi, yakni dengan pembentukan dan penguatan organisasi, keterlibatan DMO, dan inovasi kegiatan.

Kata kunci: *kepemimpinan, inovasi, ekowisata, penduduk lokal, Ngadas, Bromo, Meru Betiri, Candirejo*

ABSTRACT

The requirement for leadership and innovation in entrepreneurship development of ecotourism services is very significant. The leadership and innovation can guard conservation visions, increase the participation of local people, and provide an economic value-added. Ecotourism organization (process and management) will guide ecotourism entrepreneurship learning through leadership and innovation roles. Author's study showed that the leadership in the Ngadas village does not operate optimally to motivate the establishment of ecotourism organization. The ecotourism services develop naturally, unplanned and uncontrollable and does not assure a vision for the conservation and welfare. In Rajegwesi, the leadership is able to identify substance, vision and mission of environmental conservation. The leadership in Rajegwesi Ecotourism Society (MER) under supervision TNMB was able to develop a variety of innovative products and services, to do business development and to increase the added value of ecotourism. The ecotourism leadership in the Candirejo village function optimally. The ecotourism services that independently managed by the community in the management of 'cooperative' is able to present an innovative products and services in the ecotourism activities. It also attracts a significant number of visitors, especially foreign tourists. This phenomenon can enrich the study of ecotourism management. During this time, the management of ecotourism is always associated with the standard management of the national park. The Candirejo ecotourism considered as a successful model even outside the national park management. Implementation of the role of leadership and innovation in entrepreneurship development of ecotourism services is expressed through the following strategies : (i) production and participation, with emphasis on identification of products and services, excellent products, product innovation, production management, and social entrepreneur; (ii) the promotion and co-operation, emphasis on market segmentation, cooperation (networking), and the development of promotional media; (iii) conservation education, with a focus on interpretation, communication, and program packaging (cultivation, processing, commemorating); (iv) management and organization, namely the formation of and strengthening the organization, DMO engagement, and innovation activities.

Keywords: *leadership, innovation, ecotourism, local people, Ngadas, Bromo, Meru Betiri, Candirejo*

PENDAHULUAN

Ekowisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Wood, 2002).

Sektor ekowisata mengalami perkembangan signifikan di berbagai belahan dunia (Horton, 2009). Peningkatan kemampuan kewirausahaan jasa ekowisata menjadi kunci bagi

partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal. Penduduk lokal perlu proses pembelajaran agar menguasai kewirausahaan ekowisata (Juma and Timmer, 2003). Dengan demikian, usaha ekowisata dapat dimaknai serupa seperti halnya usaha tani yang dapat memberi pekerjaan dan penghidupan, serta menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan (Nugroho, 2007). Hasil penelitian penulis (Nugroho, Negara dan Nugroho, 2009) memperlihatkan bahwa fenomena kewirausahaan sosial adalah komponen penting lahirnya kewirausahaan ekowisata. Usaha ekowisata juga menunjukkan kelayakan ekonomi lebih tinggi dibanding usaha tani (Purnomowati, Nugroho dan Negara, 2012).

Karakter jasa ekowisata adalah klaster (cluster) (Fodor and Sitanyi, 2008a; 2008b) yang senantiasa menempatkan penduduk lokal dalam posisi kurang menguntungkan (Lash and Austin, 2003). Klaster ekowisata merupakan organisasi ekowisata (Prieto, Gilmore and Osiri, 2009) yang diperankan penduduk lokal, lembaga swadaya masyarakat, pelaku swasta, taman nasional dan pemerintah untuk menghasilkan kewirausahaan ekowisata. Klaster ekowisata harus diorganisasikan secara cermat untuk menghasilkan pemberdayaan khususnya penduduk lokal (Scheyvens, 1999). Pengembangan ekowisata sering berhadapan dengan isu politik lokal, distribusi kesejahteraan dan partisipasi (Horton, 2009). Isyu ini sangat mendasar karena pengembangan ekowisata lebih banyak diinisiasi dan diperankan oleh penduduk luar wilayah atau bahkan oran asing. Ketidakmampuan organisasi mengakibatkan konflik antara penduduk lokal dengan penduduk luar wilayah, yang berujung kepada ancaman kerusakan lingkungan ekowisata dan menurunnya kesejahteraan dan kemiskinan.

Peningkatan kewirausahaan ditentukan oleh empat domain yakni lingkungan, tim atau kepemimpinan, peluang dan mekanisme organisasi (Cogliser and Brigham, 2004). Kewirausahaan akan melahirkan keunggulan wilayah (Drabenstott, 2006) apabila diperkuat dengan kepemimpinan dan inovasi untuk mengorganisasikan jasa ekowisata. Menurut Prieto, Gilmore and Osiri (2009), kepemimpinan menjalankan berbagai kewajiban organisasi dan menyusun prioritas strategis dalam konservasi lingkungan. Kepemimpinan mengembangkan visi (konservasi) lingkungan untuk diimplementasikan ke dalam pengawasan ekologi dan perlindungan sumberdaya. Kepemimpinan yang didukung inovasi berperan untuk menggali potensi lokal, berupa inisiatif dan partisipasi dalam rangka berkontribusi program-program lokal (*bottom-up innovation*) dalam aspek lingkungan dan sosial budaya (Fodor and Sitanyi, 2008a). Inovasi diperlukan untuk memelihara kluster ekowisata agar mendistribusikan aliran manfaat kepada penduduk lokal maupun pengunjung dari anasir-anasir perilaku pasar yang mengancam konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Raufflet, Berranger and Gouin, 2008).

Praktek dan cerita sukses pengembangan kewirausahaan ekowisata dapat mengambil teladan dari Desa Candirejo, kecamatan Borobudur, kabupaten Magelang. Hasil penelitian penulis (Nugroho dan Negara, 2012; 2013) memperlihatkan bahwa kepemimpinan dan

inovasi di desa Candirejo terbukti cukup berhasil mengembangkan jasa usaha dan melahirkan kewirausahaan ekowisata. Desa ini menjual lingkungan dan budaya jawa dan 'Borobudur'. Jasa ekowisata dikelola oleh masyarakat secara mandiri melalui koperasi. Model koperasi dan mekanisme organisasi di dalamnya mendukung berfungsinya kepemimpinan, dan sebaliknya memperkuat fungsi koperasi. Inovasi dan kreasi ragam jasa layanan menunjukkan kerjasama seluruh pihak sehingga mampu menjalankan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuannya, yakni kesejahteraan serta konservasi lingkungan dan budaya. Kunjungan wisatawan manca negara maupun domestik meningkat dengan waktu, mencapai sekitar 3695 orang pada tahun 2011 (Koperasi Desa Candirejo, 2012). Kepemimpinan lebih jauh mampu (i) mengendalikan mutu jasa layanan ekowisata; (ii) mengembangkan komunikasi dan partisipasi; dan (iii) mengembangkan inovasi ekowisata mencakup teknologi, kelembagaan, produk dan jasa ekowisata dan penunjangnya.

Cerita sukses ini sudah barang tentu harus disebarakan dan dinikmati oleh desa-desa lainnya. Dengan demikian, petani atau penduduk lokal memiliki pilihan dan ragam produksi tidak hanya dari usaha tani, ikan atau ternak, tetapi juga berasal dari usaha jasa wisata maupun penunjang wisata lainnya. Hal ini pada gilirannya akan menghasilkan insentif untuk mengkonservasi sistem produksi pertanian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta kelestarian lingkungan.

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah peran kepemimpinan dan inovasi dalam pengembangan kewirausahaan jasa ekowisata berbasis penduduk lokal, dan merumuskan strategi pengembangan ekowisata.

Kelembagaan Ekowisata

Mengacu kepada UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSAHE), kawasan konservasi merupakan kawasan dengan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayatinya. Konsep dan implementasi ekowisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kawasan konservasi (protected area). Jasa ekowisata dianggap sebagai salah satu pintu masuk, sebagai suatu pendekatan ekonomi, yang menelaah dan mengkaji manfaat sumberdaya alam dan lingkungan dalam kaidah-kaidah konservasi. Jasa ekowisata adalah sektor riil terdepan yang mengemas jasa lingkungan dan budaya sehingga menghasilkan manfaat bagi banyak kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Nugroho, 2007).

Kementerian Kehutanan bertanggung jawab untuk mengelola kawasan konservasi di Indonesia, mencakup kurang lebih 375 situs dengan luasan lebih dari 21 juta hektar, setara 8.5 persen dari luas daratan. Angka ini masih dibawah ambang 10 persen dari komitmen Indonesia dalam Biodiversity Action Plan. Pengelolaan TN merupakan komponen konservasi Indonesia yang terbesar dan secara kelembagaan telah dikembangkan dengan

baik. Hingga kini, telah ditetapkan lima puluh taman nasional di seluruh penjuru Nusantara (Tabel 1). Taman nasional tersebut menjadi dasar dari berbagai usaha konservasi keanekaragaman hayati dalam skala nasional maupun internasional (Rothberg, 1999).

Tabel 1. Kawasan Taman Nasional di Indonesia

Jawa	1. Karimunjawa 2. Bromo Tengger Semeru 3. Meru Betiri 4. Baluran	5. Gunung Gede Pangrango ^a 6. Gunung Halimun 7. Kep Seribu 8. Ujung Kulon ^b	9. Alas Purwo 10. Gunung Merapi 11. Gunung Merbabu 12. Gunung Ciremai
Sumatera	1. Gunung Leuser ^{a b} 2. Siberut ^a 3. Kerinci Seblat ^b 4. Bukit Tigapuluh	5. Bukit Duabelas 6. Berbak ^c 7. Sembilang 8. Bukit Barisan Selatan ^b	9. Way Kambas 10. Batang Gadis 11. Tesso Nilo
Kalimantan	1. Gunung Palung 2. Danau Sentarum ^c 3. Betung Kerihun	4. Bukit Baka-Bukit Raya 5. Tanjung Puting ^a 6. Kutai	7. Kayan Mentarang 8. Sebangau
Sulawesi	1. Bunaken 2. Bogani Nani Wartabone 3. Lore Lindu ^a	4. Taka Bonerate 5. Rawa Aopa Watumohai 6. Wakatobi	7. Kepulauan Togean 8. Bantimurung - Bulusaraung
Bali dan Nusa Tenggara	1. Bali Barat 2. Gunung Rinjani	3. Komodo ^{a b} 4. Manupeu Tanah Daru	5. Laiwangi Wanggameti 6. Kelimutu
Maluku dan Papua	1. Manusela 2. Aketajawe - Lolobata	3. Teluk Cendrawasih 4. Lorentz ^b	5. Wasur

Keterangan: ^a Cagar Biosfer, ^b World Heritage Sites, ^c Ramsar Sites

Sumber: Departemen Kehutanan (2006)

[http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_index.htm]

Pengembangan jasa ekowisata dalam tingkat pengelolaan oleh taman nasional di Indonesia telah berkembang. Struktur dan fungsi taman nasional memperlihatkan kompetensi yang makin baik sebagai berikut:

1. Memiliki struktur kelembagaan pengelolaan ekosistem, yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan ketrampilan melengkapi jasa pariwisata secara umum
2. Memiliki standar dan prosedur sesuai dengan baku mutu pengelolaan lingkungan, keamanan dan kenyamanan
3. Memberi peluang kerjasama internasional, partisipasi pengelolaan oleh operator/swasta, dan pengembangan promosi.
4. Merupakan kawasan konservasi yang dekat dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal, kelembagaan desa, dan dapat memandu pengembangan kelembagaan serta kearifan lokal (*intellectual raw material*) yang memberikan manfaat signifikan dalam konservasi dan kesejahteraan.

Aktivitas jasa ekowisata di luar wilayah taman nasional juga dapat dikembangkan. Wilayah tujuan ekowisata tersebut biasanya memiliki karakteristik konservasi yang kuat baik dari aspek kehidupan sosial maupun lingkungannya. Kearifan, pengalaman dan nilai-nilai budaya menyatu dengan lingkungan untuk mendukung kehidupan ekonomi. Wilayah tujuan ekowisata itu dapat menjadi bagian dari ekosistem pesisir, lautan, atau daratan; di sekitar kawasan konservasi, desa atau wilayah yang memiliki nilai-nilai khas yang harus diwariskan untuk generasi mendatang. Dalam RPJMN (2010-2014), pengembangan ekowisata di sepanjang wilayah selatan pulau Jawa telah menjadi pilihan dalam arahan percepatan pembangunan perdesaan di dalam kerangka membangun keseimbangan ekonomi wilayah Jawa Bali.

Pengembangan ekowisata di luar wilayah taman nasional banyak dikembangkan oleh organisasi masyarakat atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam ekowisata. Mereka ini biasanya memiliki pengetahuan ekowisata, informasi pasar, modal dan potensi wilayah tujuan ekowisata. Baik secara individual, maupun membentuk jaringan dengan LSM, atau perguruan tinggi, mereka mampu membangun saluran informasi kepada pengunjung melalui berbagai media. Mereka kemudian mendapat sambutan positif dari penduduk lokal melalui manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga seluruh stakeholder ekowisata bersama-sama bertanggungjawab memastikan sustainability sumberdaya ekowisata (Nugroho, 2011).

Saat ini, rencana pengembangan pariwisata (termasuk ekowisata) mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 50 tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai leading sector telah menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dimana 15 DPN dipromosikan melalui program Destination Management Organization (DMO) dalam periode 2010 hingga 2014, yakni Sabang, Toba, Kota Tua, Pangandaran, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Batur, Rinjani, Flores, Tanjung Puting, Derawan, Toraja, Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat. DMO adalah konsep manajemen tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata (dikutip dari <http://www.dmoindonesia.com>).

Pemerintah juga menjalankan PNPM Mandiri pariwisata untuk desa wisata dengan kriteria: (i) keunikan dan atraksi wisata lingkungan atau budaya, (ii) dukungan akomodasi, homestay, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan/tamu, dan (iii) jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan. Pemerintah akan mengembangkan 967 desa wisata di seluruh Indonesia pada tahun 2012, dengan bantuan dana sebesar 150 juta rupiah per desa (Antara News, 25 September 2012). Program-program tersebut memiliki dampak signifikan

memperkuat pengembangan wisata di desa. Pengembangan homestay ekowisata dikembangkan melalui program PNPM Mandiri (Peraturan Menteri Kehutanan No P. 16/Menhut-II/2011) dikaitkan program Model Desa Konservasi (MDK). MDK diarahkan kepada masyarakat miskin, berupa pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Program ini diimplementasikan secara fleksibel sesuai kondisi lapangan, misalnya bantuan teknologi biogas untuk mengurangi konsumsi kayu bakar; pembinaan organisasi ekowisata, dan bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas homestay.

Pemerintah daerah juga telah memiliki panduan pengembangan ekowisata dilandasi prinsip-prinsip (Permendagri No 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Pasal 2): (i) kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; (ii) konservasi; (iii) ekonomis; (iv) edukasi; (v) kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; (vi) partisipasi masyarakat dan (vii) menampung kearifan lokal (Nugroho, 2010).

Kewirausahaan Ekowisata

Entrepreneur adalah orang yang mengadopsi suatu ide ke dalam suatu praktek bisnis atau menghasilkan produk (Juma and Timmer, 2003). Kemampuan seorang entrepreneur sedemikian penting di wilayah tujuan ekowisata karena ia dapat menjembatani beragam kepentingan stakeholder, dan menyelesaikan permasalahan dalam kebersamaan dan keberlanjutan manfaat. Kewirausahaan dapat diukur melalui kreatifitas dan inovasi. Kreatifitas adalah memikirkan sesuatu hal yang baru, sementara inovasi adalah membuat sesuatu yang baru. Uraian ini menjelaskan peran **faktor individu** dalam kewirausahaan.

Konsep kewirausahaan ekowisata lahir dari tantangan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dilandasi dengan tata nilai masyarakat. Kerangka teori yang mendasari pengembangan kewirausahaan antara lain (i) model ekologi Murphy (*Murphy's Ecological Model*), yang menekankan kepada partisipasi, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat; (ii) teori keterlibatan sosial (*Community Attachment Theory*), yang menjelaskan pengaruh, kontribusi, dan keterlibatan masyarakat; dan (iii) teori pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*), yang menjelaskan hubungan di antara komponen masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan (Kumar, Gill dan Kunasekaran (2012).

Faktor sosial menjadi komponen penting pengembangan kewirausahaan ekowisata. Menurut Juma and Timmer (2003), pembelajaran sosial (*social learning*) menjadi bagian penting dimana individu-individu memahami kewirausahaan. Melalui proses pembelajaran partisipatif terjadi proses transfer pengetahuan sehingga melahirkan distribusi manfaat dan kebersamaan pandangan di dalam masyarakat. Menurut CRE (2003), faktor sosial mencerminkan iklim kewirausahaan masyarakat dan dapat menjadi ukuran potensial kewirausahaan individu.

Konsep kewirausahaan pemerintah berhubungan dengan berkembangnya fungsi layanan pemerintah mengikuti kaidah dan cara berpikir bisnis swasta. Pola pikir

entrepreneur dipelopori oleh pimpinan birokrasi untuk menghasilkan perubahan sistem birokrasi yang mendukung kreativitas, inovasi, efektivitas, efisiensi, profesionalitas, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan (masyarakat). Pada posisi ini, kewirausahaan pemerintah merupakan metamorfosis dari kewirausahaan sosial, dimana pemerintahan yang menempatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan *entrepreneur*.

Kewirausahaan pemerintah, atau lebih spesifik wirausaha birokrat, tidak berarti membentuk pebisnis di lingkungan pemerintahan, atau menjadikan pemda sebagai perusahaan yang mengambil untung dari masyarakat. Namun seorang birokrat harus mampu berinovasi melahirkan inovasi kelembagaan antara lain melalui *capacity building* dan perubahan dari cara berpikir birokratik ke *entrepreneur*. Inovasi kelembagaan dikembangkan untuk memfasilitasi pertumbuhan investasi dan lahirnya *entrepreneur*, misalnya bantuan teknis dan manajemen, dan networking dengan supplier atau pasar (Kumar, Gill dan Kunasekaran, 2012).

Penulis telah melakukan penelitian untuk mengukur uji kewirausahaan individu, sosial dan pemerintah di wilayah TN BTS (Nugroho, Negara, Nugroho, 2009) (Tabel 2). Secara keseluruhan rata-rata uji kewirausahaan individu adalah 35.84. Kewirausahaan individu tertinggi ditemukan di desa Cemorolawang (=38.21), diikuti Ranupane (=36.00) dan Ngadas (=34.45). Menurut CRE (2003), responden di tiga desa tersebut tergolong berjiwa *entrepreneur* (dalam kisaran 30 hingga 39).

Tabel 2. Nilai Skor Uji Kewirausahaan Individu, Sosial dan Pemerintah

Wilayah	Kewirausahaan Individu	Kewirausahaan Sosial	Kewirausahaan Pemerintah
Cemorolawang	38.21	13.69	17.34
Ngadas	34.45	13.90	14.36
Ranupane	36.00	15.56	15.31
Total Wilayah	35.84	14.61	15.33

Sumber: Nugroho, Negara dan Nugroho (2009)

Keterangan skor:

Uji kewirausahaan individu: skor:0 hingga 9 =Tidak berjiwa *entrepreneur*; 10 hingga 19 =Sedikit berjiwa *entrepreneur*; 20 hingga 29 =Sebagian berjiwa *entrepreneur*; 30 hingga 39 =berjiwa *entrepreneur*; 40 hingga 50 =Sangat berjiwa *entrepreneur*

Uji kewirausahaan sosial atau pemerintah: skor:0 hingga 5 =Tidak mendukung; 6 hingga 10 =Netral; 11 hingga 15 =Setengah mendukung; 16 hingga 20 =Mendukung; 21 hingga 25 =Sangat mendukung

Sementara itu, rata-rata skor uji kewirausahaan sosial sebesar 14.61. kewirausahaan sosial tertinggi ditemukan di desa Ranupane (=15.56), diikuti Ngadas (=13.90) dan Cemorolawang (=13.69). Menurut CRE (2003), responden di tiga desa tergolong setengah

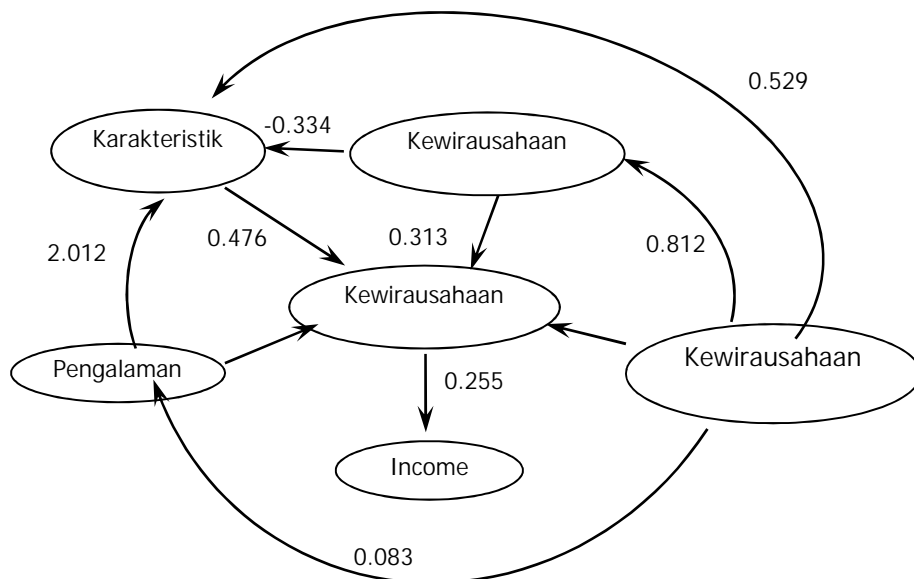
mendukung berkembangnya kewirausahaan (kisaran 11 hingga kurang dari 16). Rata-rata skor uji kewirausahaan pemerintah di tiga desa adalah 15.33. Kewirausahaan pemerintah tertinggi ditemukan di desa Cemorolawang (=17.34), diikuti Ranupane (=15.31) dan Ngadas (=14.36). Menurut CRE (2003), responden di desa Cemorolawang mempersepsikan pemerintah mendukung berkembangnya kewirausahaan (kisaran 16 hingga kurang dari 21), sementara di desa Ranupane dan Ngadas, responden mempersepsikan pemerintah setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan (kisaran 11 hingga kurang dari 16). Penelitian juga menghasilkan model struktural kewirausahaan seperti disajikan dalam Gambar 1. Model menunjukkan bahwa kewirausahaan individu dapat diukur dari kewirausahaan sosial dan karakter individu. Hal ini adalah petunjuk awal identifikasi hubungan antara komponen kewirausahaan individu dan kewirausahaan secara umum.

Pengaruh kewirausahaan pemerintah terhadap kewirausahaan individu dapat dijumpai variabel antara kewirausahaan sosial, karakteristik individu dan pengalaman, masing-masing dengan kumulatif koefisien regresi 1.125, 1.005 dan 0.014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial menjadi jembatan paling kuat bagi pengaruh kewirausahaan pemerintah terhadap kewirausahaan individu, dimana dalam hubungan pengaruh langsung tidak signifikan. Dengan demikian, penelitian ini mampu membuktikan bahwa pengembangan kewirausahaan sosial adalah syarat perlu bagi pemerintah untuk mengembangkan kewirausahaan individu jasa ekowisata. Lebih penting dari itu, kewirausahaan pemerintah menjadi modal awal mengawalinya untuk membangun trust kepada masyarakat dan pelaku ekonomi ekowisata.

Pengaruh variabel antara karakteristik individu dalam hubungan kewirausahaan pemerintah terhadap kewirausahaan individu, maupun pengalaman terhadap kewirausahaan individu; memperlihatkan besaran signifikan. Implementasi spesifik hubungan ini, sesuai dengan variabel yang diamati, pemerintah berperan dalam pembangunan pendidikan sebagai media untuk mengembangkan kewirausahaan individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan, akan memperbaiki cara berpikir dan pengetahuan sehingga terjadi pembelajaran berwirausaha.

Penelitian penulis (Purnomowati, Nugroho dan Negara, 2012) melengkapi deskripsi kewirausahaan. Penelitian menghasilkan kinerja dan kapasitas penduduk lokal dalam aktivitas ekonomi riil usaha tani atau ekowisata. Analisis kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa pekerjaan petani maupun pekerjaan campuran (usaha tani atau ekowisata) layak dijalankan, namun pekerjaan campuran memberikan benefit lebih tinggi dibanding pekerjaan petani, masing-masing dengan NPV 53.84 dan 7.76 juta rupiah, serta BCR 1.3775 dan 1.0866. Sementara hasil analisis kecenderungan pilihan usaha menunjukkan bahwa peubah fasilitas (kepemilikan motor atau mobil), pengalaman (bekerja di luar kota atau mengikuti pelatihan) dan skor kewirausahaan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kecenderungan pilihan usaha campuran atau ekowisata, masing-masing dengan koefisien

sebesar 1.1522, 1.6928 dan 0.15599. Ketiga variabel menjadi sumber inspirasi penduduk masuk ke dalam proses pembelajaran kewirausahaan, sehingga terbentuk perilaku produktif dalam jasa ekowisata.



Gambar 1. Struktur Kewirausahaan (Nugroho, Negara, dan Nugroho, 2009)

Kepemimpinan dan Inovasi

Kebutuhan akan kepemimpinan dalam jasa ekowisata sangat penting (WES, 2002). Organisasi *cluster* ekowisata perlu diperkuat dengan kepemimpinan untuk menjalankan visi, misi dan strategi dalam konservasi lingkungan (Prieto, Gilmore and Osiri, 2009). Penulis mengidentifikasi peran kepemimpinan dan inovasi di tiga tujuan ekowisata, yakni desa Ngadas (TNBTS), Rajegwesi (TNMB) dan Candirejo (Jawa Tengah) (Nugroho dan Negara, 2012; 2013a, 2013b). Produk dan jasa ekowisata disajikan pada Tabel 3.

Kepemimpinan dalam pengembangan jasa ekowisata di desa Ngadas diperankan oleh tiga komponen. Pertama, Kepala Desa yang menjalankan aktifitas pemerintahan formal, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lokal dan menurunkan kebijakan di atasnya. Kedua, dukun yang memimpin dan menjalankan kegiatan tradisi budaya, serta fungsi-fungsi kelembagaan tradisional dan kehidupan Tengger. Pemimpin informal ini menjalankan fungsi koordinasi dan konsultasi untuk kehidupan keseharian, dan menyelesaikan masalah dalam adat Tengger. Ketiga, para pelaku atau entrepreneur lokal (bahkan dari luar Ngadas) yang menjalankan usaha dan mengembangkan ekowisata. Entrepreneur tersebut secara nyata

mengerjakan dan berusaha jasa ekowisata di Ngadas. Mereka ini terdiri pemilik homestay, pemandu, atau penyedia jasa transportasi.

Tabel 3. Produk dan Jasa Ekowisata di TN Meru Betiri dan Bromo Tengger Semeru dan Candirejo

No	Produk dan jasa	TN Bromo Tengger Semeru	TN Meru Betiri	Desa Candirejo
1	Pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya	flora dan fauna; lautan pasir, pengamatan matahari terbit; savana, ranu pane, ranu kumbolo, ranu regulo, air terjun (trisulo dan coban pelangi); budaya Tengger, upacara kasodo dan karo	flora dan fauna; Gunung Meru Betiri, pantai Sukamade, Teluk Meru, Teluk Hijau, Teluk Permisian, Teluk Damai; habitat dan pembiakan penyu di pantai Sukamade, Pantai Rajegwesi	Bukit menoreh, watu kendil, kali progo, tempuran, Borobudur, tradisi budaya Jawa seperti Nyadran, Sedekah Bumi, upacara Jumat kliwon, kesenian lokal seperti jathilan, kubrosiswo
2	Manfaat lansekap	pendakian gunung Semeru, Bromo, Widodaren, Batok, offroad, trekking lautan pasir, trekking savana, para layang	Menjelajahi hutan di sekitar Teluk Hijau. trekking Nanggalan-Bandealit (3 hari), trekking Bande Alit-Sukamade (3 hari), panjat tebing, wisata bahari, kampung nelayan tradisional	trekking bukit menoreh, rafting , lembah Borobudur,
3	Akomodasi dan fasilitas layanan pendukung	hotel, <i>homestay</i> , restoran, pondok wisata di Ngadisari dan Ranu pane, camping ground	Pondok wisata dan wisma peneliti, menara pandang, camping ground, dilayani MER (Masyarakat Ekowisata Rajegwesi)	homestay, kantor koperasi desa wisata Candirejo
4	Peralatan dan perlengkapan	Pemandu wisata, Sewa kuda, motor ojek, jip offroad	Pemandu wisata, motor jagawana	Pemandu wisata, DVT (dockart village tour), sepeda gunung,
5	Pendidikan dan ketrampilan	Penelitian kearifan lokal,	Penelitian pembiakan penyu, ekspedisi harimau jawa	Pelatihan memasak tradisional Jawa, berlatih gamelan
6	Penghargaan	Tidak ada secara formal	Tidak ada secara formal	Kalpataru perintis lingkungan tahun 2009

Sumber: Nugroho dan Negara (2013b), klasifikasi berdasarkan Manurung (2002)

Secara umum, fungsi kepemimpinan dari para figur berjalan positif sesuai dengan kewenangannya. Mereka menjalankan fungsinya secara harmoni mendukung kehidupan Tengger mewujudkan kedamaian, saling menghormati dan toleransi menerima budaya lain dari setiap pengunjung. Namun demikian, mereka perlu menunjukkan pengaruh yang positif (Coglisera and Brigham, 2004) agar mampu memberikan ruang bagi terbentuknya model pengelolaan ekowisata. Kepala Desa atau dukun sudah memiliki pandangan atau visi konservasi tentang kehidupan masyarakat. Sementara di antara pelaku ekowisata masih menunjukkan perihal ekonomi pragmatis dan transaksional, yang kurang mendukung visi konservasi.

Organisasi pengelolaan ekowisata di desa Ngadas belum terkoordinasi dengan baik. Layanan ekowisata masih menghadapi masalah pada tingkat produksi, dan penduduk belum siap menyediakan layanan yang baik. Hal ini memerlukan energi besar untuk mengorganisasikannya, dan membutuhkan kepemimpinan yang kuat, agar berdampak kepada kesejahteraan penduduk Ngadas. Saat ini sudah terbangun pos (tiket) masuk TNBTS di desa Ngadas, sekaligus retribusi untuk desa Ngadas, namun masih belum berfungsi selayaknya visitor center.

Inovasi kelembagaan untuk mengelola jasa ekowisata menjadi kebutuhan penting di desa Ngadas. Melalui kelembagaan itu dapat didiskusikan dan dirumuskan secara sistematis inovasi produk dan jasa ekowisata. Pihak TNBTS memiliki posisi penting dengan berbagai kompetensi yang dimilikinya. TNBTS dapat memberi solusi model pengelolaan ekowisata sebagaimana pengalaman di TNMB menjalankan program model desa konservasi (MDK). Dengan tidak ada organisasi pengelolaan ekowisata di Ngadas, inovasi berjalan sporadis atau lebih banyak diperankan secara individual oleh pelaku ekowisata, termasuk pelaku dari luar wilayah (Horton, 2009).

Kepemimpinan dalam jasa ekowisata **di Rajegwesi** diperankan oleh dua komponen. **Pertama**, pihak TNMB yang secara langsung menjalankan manajemen kawasan konservasi sebagaimana peraturan perundangan. **Kedua**, para pelaku jasa ekowisata yang tergabung dalam MER. Pelaku jasa ekowisata ini adalah pemilik *homestay*, pemandu, atau penyedia jasa transportasi. Kedua komponen ini berjalan sangat kondusif dalam koordinasi yang sangat intensif. Inisiatif masih lebih banyak diperankan oleh petugas TNMB yang kebetulan memiliki 'pengaruh' baik terhadap anggota MER. Petugas ini mampu berkomunikasi sangat baik dengan pemuda desa dan menjadi motivator untuk pengembangan ekowisata, menjalankan fungsi kepemimpinan (Coglisera and Brigham, 2004). Petugas ini menjadi *real leader* MER, yang mendinamisasi seluruh aktivitas MER atau kehadiran wisatawan. Dalam banyak hal, dimana MER belum mampu beroperasi, petugas TNMB mengambil alih layanan kepada wisatawan secara langsung, misalnya menyediakan mobil jeep *offroad* menuju Sukamade.

Kepemimpinan yang diperankan oleh petugas TNMB sangat signifikan menghadirkan visi dan misi MER. Peran ini berjalan karena sesuai dengan fungsi TNMB, khususnya menjalankan program MDK yang merupakan program prioritas Kementerian Kehutanan mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Peraturan Menteri Kehutanan No P. 16/Menhut-II/2011). Pengaruh positif ini menghasilkan pemberdayaan dan pembelajaran kewirausahaan MER (Scheyvens, 1999) hingga memperoleh kesejahteraan yang nyata, melalui peningkatan pendapatan.

Tabel 4. Kepemimpinan dan Inovasi dalam Jasa Ekowisata di Desa Ngadas, Rajegwesi dan Candirejo

Peranan	Aspek	Ngadas	Rajegwesi	Candirejo
<i>Leadership</i>	<i>Leader yang berpengaruh</i>	Kurang signifikan, diperankan oleh pelaku ekowisata	Signifikan, diperankan oleh petugas TNMB dan pelaku ekowisata	Signifikan, diperankan oleh Kepala desa, Koperasi dan pelaku ekowisata
	Penguasaan substansi	Kurang signifikan, secara alamiah, oleh pelaku ekowisata	Signifikan, sistematis, oleh petugas TNMB	Signifikan, sistematis, oleh Koperasi
	Dampak Pembelajaran	Kurang signifikan, secara alamiah	Signifikan, sistematis, oleh petugas TNMB	Signifikan, sistematis, oleh Koperasi
	Pengambilan keputusan	Belum signifikan	Signifikan, membentuk MER	Signifikan, membentuk Koperasi sejak 2003
	Pengendalian	Tidak Signifikan	Belum signifikan	Sangat signifikan
	Komunikasi dan partisipasi	Belum signifikan	Signifikan, komunikasi dalam layanan ekowisata	Signifikan, komunikasi dalam musyawarah Desa, organisasi Koperasi dan dalam layanan ekowisata
Inovasi	Kelembagaan	Tidak ada, baru ada pos masuk, belum terkelola	Terorganisasi dalam MER, dalam pembinaan MER	Terorganisasi dalam Koperasi
	Produk dan jasa	Tidak ada, secara alamiah, belum dikelola	Terorganisasi dalam MER	Terorganisasi dalam Koperasi

Sumber Nugroho dan Negara (2012; 2013a, 2013b)

Inovasi ekowisata dalam konteks MER masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, mencakup kelembagaan, teknologi, produk dan jasa ekowisata dan penunjangnya. Karakter pengunjung ke TNMB sangatlah spesifik, serius, dan pecinta lingkungan. Sebagai misal, mereka pergi ke Sukamade dengan tujuan untuk menyaksikan pembiakan penyu. Mereka memerlukan waktu sedikitnya dua hari dan semalam, dengan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan wisatawan ini perlu dikompensasi dengan berbagai inovasi yang memberikan pengalaman mengesankan kepada pengunjung.

Mereka sekarang sudah mampu menawarkan program paket sehari untuk menikmati obyek wisata di sekitar Rajegwesi atau TNMB. MER juga menyelenggarakan festival kuliner dan tour de Rajegwesi (pada tanggal 26 hingga 27 Oktober 2013). Ini adalah pengalaman yang luar biasa, karena dapat mengorganisasikan kegiatan yang sama sekali baru. Bagaimanapun juga penduduk lokal masih berkarakter nelayan atau petani. Mereka melakukan perubahan cara berpikir, bersikap dan berperilaku yang lebih melayani dan berkarakter jasa.

Kepemimpinan di dalam jasa ekowisata di dalam tiga wilayah yang dipelajari menunjukkan kinerja yang berbeda. Kepemimpinan di desa Ngadas menyajikan pengaruh yang kurang signifikan dibanding di Rajegwesi (Tabel 4).

Leadership di dalam jasa ekowisata Candirejo sudah berkembang optimal. Model koperasi dan mekanisme organisasi di dalamnya mendukung berfungsinya leadership, dan sebaliknya leadership dapat menstimulasi perkembangan koperasi dan jasa ekowisata. Profil leader kepala desa membuktikan bahwa inisiatifnya mampu diserap dan dipahami oleh warganya. Profil ketua koperasi juga merupakan leader yang memiliki pengaruh yang positif di dalam masyarakat dan anggota koperasi.

Inovasi ekowisata Candirejo masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, mencakup teknologi, kelembagaan, produk dan jasa ekowisata dan penunjangnya. Karakter pengunjung ke Candirejo pada dasarnya adalah peminat budaya Jawa, yang kebanyakan dari mancanegara. Tujuan utama para wisatawan itu adalah Yogyakarta atau candi Borobudur. Koperasi telah memiliki jejaring dengan biro-biro perjalanan terutama di Yogyakarta untuk menghadirkan wisatawan ke Candirejo. Karena itu, Candirejo harus mampu menyediakan paket wisata yang khas, dengan kemasan yang menarik dan layanan yang baik. Berbagai inovasi dapat dibangun misalnya, homestay yang bersih, kuliner, atau aktivitas-tradisi budaya. Koperasi ekowisata Candirejo berupaya mengembangkan inovasi dalam berbagai kegiatan (Tabel 3).

Koperasi ekowisata Candirejo beranggotakan 56 orang terdiri kelompok pelaku usaha homestay (20), pemandu wisata (7 orang), kesenian (jatilan, dayakan, kobra, wulan sunu/selawatan, karawitan), agro (pepaya, rambutan, dll), rafting, outbond dan dokar/andong (10 pemilik andong). Jasa yang dilayani meliputi wisata alam, wisata agro, seni budaya, rafting, outbond dan simpan pinjam. Selama sembilan tahun sejak berdirinya, perkembangan usaha meningkat signifikan mengikuti jumlah pengunjung (Tabel 5). Pada tahun 2011, jumlah sisa hasil usaha mencapai 71 juta rupiah, dengan dominasi pengunjung dari manca negara.

Tabel 5. Perkembangan Kinerja Usaha dan Pengunjung Koperasi Candirejo

Tahun	Kinerja Usaha (juta rupiah)			Pengunjung (orang)		
	Pendapatan	Pengeluaran	SHU	Domestik	Asing	Jumlah
2003	18.45	16.89	1.56	1071	43	1114
2004	40.85	37.77	3.08	1057	61	1118
2005	71.27	65.89	5.38	432	611	1043
2006	112.40	106.97	5.44	912	644	1556
2007	185.72	179.38	6.34	973	1056	2029
2008	193.83	185.53	7.45	1449	1424	2873
2009	202.29	192.16	10.14	1282	1796	3078
2010	239.12	224.64	14.49	1077	1872	2949
2011	340.55	320.89	17.10	632	3063	3695
Jumlah	1404.49	1330.12	70.97	8885	10570	19455

Sumber: RAT Koperasi tahun 2011 (Koperasi Desa Candirejo, 2012)

Kinerja ekowisata Candirejo hampir sama dengan Organisasi koperasi "Tnunan" di Taiwan (Tang and Tang, 2010), yang mampu memadukan nilai-nilai tradisional "Gaga" dengan manajemen ala corporate. Koperasi membangun fasilitas penginapan, restoran dan pertokoan, dan membagi tugas kepada seluruh anggota berdasarkan kesepakatan yang diarahkan oleh pemimpin koperasi. Anggota koperasi dapat memperoleh manfaat, antara lain upah (sesuai tugasnya), asuransi kesehatan, subsidi pendidikan, jaminan kematian, bantuan pernikahan atau bantuan emergensi lainnya. Koperasi ekowisata Candirejo sudah mampu menampilkan kinerja finansial dan non finansial yang memuaskan sebagaimana de Waal (2012).

Strategi Pengembangan

Peran kepemimpinan dan inovasi dapat diimplementasi untuk menyusun strategi pengembangan kewirausahaan jasa ekowisata. Razzaq, et al. (2012) mengidentifikasi bahwa pemberdayaan masyarakat adalah komponen penting partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata. Pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kepemimpinan dan organisasi lokal dalam memainkan jasa wisata. Peran leadership dan inovasi dalam pemberdayaan dapat dilihat dalam aspek (i) produksi dan partisipasi, (ii) promosi dan kerjasama, (iii) pendidikan konservasi, dan (iv) manajemen dan organisasi.

Tabel 6. Isyu Pokok dan Permasalahan dalam Pengembangan jasa Ekowisata di TN Meru Betiri dan Bromo Tengger Semeru dan Candirejo

No	Aspek kegiatan	Isyu pokok dan permasalahan	Derajat Permasalahan*)		
			Desa Candi-rejo	TN Bromo Tengger Semeru	TN Meru Betiri
1	Produksi dan partisipasi	Identifikasi produk dan jasa, produk unggulan, inovasi produk, manajemen produk, social entrepreneur	1	3	2
2	Promosi dan kerjasama	Segmentasi pasar, kerjasama (<i>networking</i>), media promosi	1	2	3
3	Pendidikan	Interpretasi, komunikasi, kemasan program (budidaya, mengolah, memperingati)	1	3	1
4	Manajemen dan organisasi	Pembentukan dan penguatan organisasi, DMO, inovasi kegiatan	1	3	2
	Jumlah		4	11	8

*) ukuran kualitatif derajat permasalahan, 1= rendah, 2= sedang, 3= berat

Sumber: Nugroho dan Negara (2013b)

Kondisi pengelolaan ekowisata di desa Candirejo (Tabel 6) dapat menjadi acuan pengembangan ekowisata. Sebagaimana diakui pengurus MER, mereka telah melakukan

studi banding dan banyak mencontoh model pengelolaan ekowisata Candirejo. Candirejo juga diakui sebagai model desa ekowisata secara nasional¹. Koperasi ekowisata Candirejo menjalankan fungsinya (kepemimpinan dan inovasi) secara baik dalam berbagai kegiatan. Sementara, ekowisata di Rajegwesi (dengan derajat permasalahan 8) menempati posisi sedang, dan masih memerlukan penguatan, fokus dan pengembangan. Adapun ekowisata di Ngadas, dengan derajat permasalahan 11, perlu bekerja keras dalam berbagai bidang untuk menjadi desa ekowisata yang maju.

Strategi umum pengembangan kewirausahaan ekowisata dapat disusun sebagai berikut:

- a. **Produksi dan partisipasi.** Strategi ini dapat dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:
 - i. Identifikasi produk dan jasa, yakni menemukan produk budaya dan lingkungan yang memerlukan perhatian untuk dikonservasi
 - ii. Produk unggulan, yakni menganalisis dan menetapkan produk budaya dan lingkungan unggulan yang unik, menonjol, untuk dikonservasi yang memuat unsur pendidikan.
 - iii. Inovasi produk, yakni menganalisis dan menemukan produk budaya dan lingkungan unggulan yang baru, untuk mendukung konservasi dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya
 - iv. Manajemen produk, yakni melaksanakan pengelolaan produk budaya dan lingkungan dengan standar tertentu untuk menjamin konservasi
 - v. Social entrepreneur, yakni mengembangkan kepemimpinan lokal jasa ekowisata, untuk menjalankan fungsi wirausaha sosial (sebagai *corporate* dan institusi) dan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan produk budaya dan lingkungan secara berkelanjutan
- b. **Promosi dan kerjasama.** Strategi ini dapat dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:
 - i. Segmentasi pasar, yakni mengembangkan dan memfokuskan minat wisatawan, menggali karakteristik wisatawan agar menghasilkan pengalaman berwisata yang memuaskan.
 - ii. Kerjasama (*networking*), yakni mengembangkan kerjasama promosi dengan pemerintah, biro perjalanan, taman nasional, perguruan tinggi, atau masyarakat.
 - iii. Media promosi, yakni mengembangkan media promosi yang lebih luas, antara lain media cetak, digital, internet, radio atau televisi.
- c. **Pendidikan konservasi.** Strategi ini dapat dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

¹ Diungkapkan oleh Ary Suhandi, ketua Indonesia Ecotourism Network (Indecon) dalam suatu sarasehan ekowisata di Kaliandra, Prigen pada tahun 2007.

- i. Interpretasi, yakni mengembangkan interpretasi secara akademik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
 - ii. Komunikasi, yakni mengembangkan pelatihan kualitas berkomunikasi, etiket, bahasa asing, dan keramah tamahan.
 - iii. Kemasan program, yakni mengembangkan kemasan program yang memuat pendidikan konservasi, antara lain budidaya, mengolah, memperingati momentum tradisi atau siklus alam tertentu.
- d. **Manajemen dan organisasi.** Strategi ini dapat dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:
- i. Pembentukan dan penguatan organisasi, yakni melaksanakan pembentukan organisasi ekowisata sesuai dengan kemampuan dan karakteristik penduduk lokal.
 - ii. DMO, yakni melaksanakan pengelolaan organisasi berdasarkan konsepsi DMO atau berintegrasi dengan DMO terdekat atau taman nasional.
 - iii. Inovasi kegiatan, yakni mengembangkan kegiatan baru atau mengorganisasikan momentum baru, untuk meningkatkan pengalaman dan menciptakan pencitraan jasa ekowisata.

PENUTUP

Peran kepemimpinan dan inovasi menunjukkan pengaruh signifikan dalam pengembangan kewirausahaan jasa ekowisata berbasis penduduk lokal. Kepemimpinan dan inovasi dapat mengawal visi konservasi, dan meningkatkan partisipasi penduduk lokal, serta mengembangkannya untuk memberikan nilai tambah ekowisata. Kepemimpinan yang didukung inovasi berperan untuk menggali potensi lokal dan memelihara ekowisata untuk senantiasa memberikan aliran manfaat kepada penduduk lokal.

Dari wilayah penelitian yang dipelajari, peran kepemimpinan dan inovasi jasa ekowisata menunjukkan kinerja yang berbeda. Kepemimpinan di desa Ngadas belum berfungsi optimal memotivasi pembentukan organisasi ekowisata. Kepemimpinan belum menjamin tercapainya visi konservasi dan kesejahteraan penduduk Ngadas.

Di Rajegwesi, kepemimpinan mampu mengidentifikasi substansi, menjalankan visi dan misi konservasi lingkungan. Kepemimpinan tersebut telah berfungsi menginisiasi pembentukan MER dan menghasilkan pemberdayaan masyarakat dalam jasa ekowisata. Sekalipun peran petugas TNMB masih dominan, namun dengan pembelajaran ekowisata dan fungsi-fungsi MER diharapkan dapat menghasilkan pelaku-pelaku yang mandiri mengembangkan inovasi ekowisata.

Fenomena kepemimpinan ekowisata di desa Candirejo berfungsi optimal. Kepemimpinan mampu menjalankan visi konservasi diikuti partisipasi penduduk lokal. Jasa

ekowisata Candirejo dikelola oleh masyarakat secara mandiri dalam manajemen 'koperasi' mampu menyajikan produk dan jasa ekowisata yang inovatif dan berkualitas, serta menarik jumlah pengunjung yang signifikan, khususnya wisatawan asing. Hal ini dapat memperkaya studi pengelolaan ekowisata. Selama ini, pengelolaan ekowisata senantiasa dihubungkan dengan standar pengelolaan oleh taman nasional. Ekowisata Candirejo termasuk yang dipandang berhasil sekalipun berada di luar pengelolaan taman nasional.

Implementasi peran kepemimpinan dan inovasi dalam pengembangan kewirausahaan jasa ekowisata dinyatakan melalui strategi sebagai berikut: (i) produksi dan partisipasi, dengan penekanan kepada identifikasi produk dan jasa, produk unggulan, inovasi produk, manajemen produk, dan social entrepreneur; (ii) promosi dan kerjasama, menekankan kepada segmentasi pasar, kerjasama (networking), dan pengembangan media promosi; (iii) pendidikan konservasi, dengan fokus kepada interpretasi, komunikasi, dan kemasan program (budidaya, mengolah, memperingati); (iv) manajemen dan organisasi, yakni dengan pembentukan dan penguatan organisasi, keterlibatan DMO, dan inovasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Coglisera, C. C. and Brigham, K. H. 2004. The intersection of leadership and entrepreneurship: Mutual lessons to be learned. *The Leadership Quarterly* 15: 771–799.
- CRE (Centre for Rural Entrepreneurship). 2003. Entrepreneurship Quick Test: tools for energizing entrepreneurship. www.ruraleship.org
- de Waal, A. A. 2012. Characteristics of High Performance Organisations. *Business Management and Strategy*. 3(1): 14-31.
- Drabenstott, M. 2006. Rethinking federal policy for regional economic development. *Economic Review*, first quarter: 115-142
- Fodor, A. and Sitanyi, L. 2008a. Clusters And Innovation In Ecotourism Development. *Interdisciplinary Management Research*. 4: 93-109.
- Fodor, A. and Sitanyi, L. 2008b. The Relationship between ecotourism clusters and innovation milieu in the region of South-Eastern Europe. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 2(10):1-14 .
- Horton, L. R. 2009. Buying Up Nature: Economic and Social Impacts of Costa Rica's Ecotourism Boom. *Latin American Perspectives*, Issue 166, 36(3): 93-107
- Juma, C. and Timmer, V. 2003. "Social Learning and Entrepreneurship: A Framework for Analyzing the Equator Initiative and the 2002 Equator Prize Finalists." Working paper of 5 December

- Koperasi Desa Candirejo. 2012. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Desa Wisata Candirejo. Tahun Buku 2011. Koperasi Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. 21p.
- Kumar, R , S. S. Gill dan P. Kunasekaran 2012. Tourism as a Poverty Eradication Tool for Rural Areas in Selangor, Malaysia. *Global Journal of Human Social Science*. 12(7): 21-26
- Lash, G. Y. B. and Austin, A. D.. 2003. Rural Ecotourism Assessment Program (REAP) A Guide to Community Assessment of Ecotourism As a Tool for Sustainable Development. EplerWood International. 86p.
- Manurung. 2002. Ecotourism in Indonesia. In: Hundloe, T (ed.). Linking Green Productivity to Ecotourism : Experiences in the Asia-Pacific Region. Asian Productivity Organization (APO), Tokyo, Japan. 98-103
- Nugroho, I and Purnawan D. Negara. 2013a. The Role of Leadership and Innovation in Ecotourism Services Activity in Candirejo Village, Borobudur, Central Java, Indonesia. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, Issue 0079, July 2013. 1178-1182
- Nugroho, I dan Negara, P. D. 2012. Peran Sistem Inovasi dan Kepemimpinan dalam Pengembangan Kewirausahaan Jasa Ekowisata Berbasis Penduduk Lokal. Laporan Penelitian Strategis Nasional tahun 2012. DP2M Dikti, Jakarta. [Tidak dipublikasi]
- Nugroho, I dan Negara, P. D. 2013b. Peran Sistem Inovasi dan Kepemimpinan dalam Pengembangan Kewirausahaan Jasa Ekowisata Berbasis Penduduk Lokal. Laporan Penelitian Strategis Nasional tahun 2013. DP2M Dikti, Jakarta. [Tidak dipublikasi]
- Nugroho, I. 2007. Ekowisata: Sektor Riil Pendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Majalah Perencanaan Pembangunan-BAPPENAS Jakarta*. Edisi 2 tahun ke XII (Januari-Maret): 44-57.
- Nugroho, I. 2010. Pengembangan Ekowisata dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Edisi 01 tahun 2010. 65-76.
- Nugroho, I. 2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 362p.
- Nugroho, I, Negara, P. D. dan Nugroho, Y. A. 2009. Karakteristik Kewirausahaan Penduduk Lokal Pada Jasa Ekowisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Social Economic of Agriculture and Agribusiness (SOCA) Journal*, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Denpasar. 9(3): 342-346.
- Prieto, L.C., Gilmore, J. and Osiri, J. K. 2009. Environmental Leadership Development: A Framework for Designing and Evaluating a Training Program. *European Journal of Social Sciences*. 9(4): 586-593

- Purnomowati, W., Nugroho, I dan Negara, P. D. 2012. Entrepreneurship Ability on Ecotourism Services of Local People in Bromo Tengger Semeru National Park, Malang Regency, East Java, Indonesia. 11th International Entrepreneurship Forum (11th IEF) Conference Entrepreneurship and Sustainability: From Lifestyles to Innovative Enterprises in Creative and Sustainable Environments. 3-6 September 2012, Kuala Lumpur, Malaysia. Conference Proceedings. Volume 2. 458-473.
- Raufflet, E., A. Berranger, A. and Gouin, J. F. 2008. Innovation in business-community partnerships: evaluating the impact of local enterprise and global investment models on poverty, bio-diversity and development. *Corporate Governance*. 8(4): 546-556
- Razzaq, A. R. A., M. Z. Mustafa, A. Suradin, R. Hassan, A. Hamzah and Z. Khalifah. 2012. Community Capacity Building for Sustainable Tourism Development: Experience from Miso Walai Homestay. *Business and Management Review* Vol. 2(5) pp. 10 – 19 July, 2012.
- Rothberg, D. 1999. Enhanced and Alternative Financing Mechanisms Strengthening National Park Management in Indonesia. NRMP USAID, Jakarta
- Scheyvens, R. 1999. Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management* 20: 245-249.
- Tang, C. P and S. Y. Tang. 2010. Institutional Adaptation and Community-Based Conservation of Natural Resources: The Cases of the Tao and Atayal in Taiwan. *Human Ecol* (2010) 38:101-111
- WES (World Ecotourism Summit). 2002. Québec Declaration on Ecotourism. WES in the Framework of the UN International Year of Ecotourism, the United Nations Environment Programme (UNEP) and the World Tourism Organization (WTO), Québec City, Canada, 19 and 22 May 2002.
- Wood, M. E. 2002. Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability. UNEP. Paris, France. 61p.